



SIMBOLIS:
 Pj Wali Kota
 Jogja saat
 pelepasan
 peserta
 program
 balik kerja
 yang
 diinisiasi
 oleh Badan
 Pengelola
 Keuangan
 Haji (BPKH)
 kemarin
 (14/4).

Atasi Kemacetan, 940 Orang Ikut Program Balik Kerja

JOGJA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar program balik kerja kemarin (14/4). Diikuti oleh 940 orang, kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pemudik yang kembali bekerja sekaligus mengurangi kemacetan di jalan. Dengan 21 armada bus, seluruh peserta langsung dilepas oleh Pj Wali Kota Jogja Singgih Raharjo dari Kompleks Balai Kota Jogja dan menuju Jabodetabek.

Anggota BPKH Sulistyowati menjelaskan, kegiatan ini merupakan pengganti dari program mudik gratis. Hal ini karena program serupa, telah banyak diselenggarakan oleh kementerian hingga perusahaan.

"Nah kalau semua (bikin program, Red) mudik justru kan sehabis pulang mereka uang sakunya habis. Makanya BPKH bikin program yang belum banyak diselenggarakan yaitu program balik kerja," ujarnya usai acara.

Dia mengaku, antusiasme masyarakat mengikuti program tersebut cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan kuota pendaftaran yang penuh hanya dalam waktu lima jam. "Saat *launching* kita buka jam 09.00, langsung siang jam 02.00 sudah habis. Padahal kuotanya sekitar 3.600 kuota (semua kota, Red)," ungkap Sulistyowati.

Pada tahun sebelumnya, program ini hanya dilaksanakan dari Sema-

rang, Jogja, dan Surabaya. Sedangkan tahun ini, ditambah keberangkatan dari Solo. "Dibuka untuk umum tapi bersyarat," bebernya.

Syarat untuk menjadi peserta, lanjutnya, adalah wajib mempunyai pekerjaan tetap di kota tujuan. Hal tersebut dibuktikan dengan menunjukkan id card atau surat keterangan telah bekerja. "Jadi tidak bisa menganggur dan ke sana," tegasnya.

Perihal sumber pendanaan program, disebutkan bukan dari uang tabungan haji. Melainkan dari optimalisasi dana abadi umat. Total dana abadi umat sebesar Rp 3,8 triliun, dan tetap utuh tidak berkurang. "Dari situ kita kelola yang disebut

menghasilkan nilai manfaat kita optimalisasikan dengan ditaruh di sukuk, deposito atau investasi. Hasilnya rata-rata setahun mendapatkan Rp 200 miliar sampai Rp 30 miliar. Uang itulah yang kita pakai," rincinya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menilai, program tersebut juga bermanfaat untuk mengurangi kemacetan di jalan. Hal itu dikarenakan transportasi untuk para pekerja yang kembali bisa terpusat dan tidak menyebar.

"Coba bayangkan dalam satu bus kalau dibagi per kendaraan pribadi bisa 6-7 kendaraan," lontarnya. **(oso/eno/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005